

TEKANAN ANGGARAN NEGARA DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19

19

Rais Agil Bahtiar dan Hariyadi

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar pada berbagai sektor. Untuk menanggulangnya pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya kebijakan fiskal. Paket kebijakan fiskal untuk stimulus ekonomi telah dikeluarkan untuk menekan dampak pandemi pada sektor ekonomi. Akibatnya, kebijakan tersebut berimbas pada keuangan negara (APBN 2020) yang berpotensi akan mengalami defisit kira-kira sebesar Rp1.028,50 triliun atau 6,72% terhadap PDB. Pelebaran defisit dikarenakan kebutuhan dana penanggulangan Covid-19 terus bertambah. Dengan beban pembiayaan APBN yang bertambah, opsi yang dapat diandalkan bersumber dari utang. Tulisan ini mengkaji tekanan anggaran negara dalam penanggulangan Covid-19. Defisit anggaran yang membengkak menjadikan utang sebagai salah satu alternatif untuk menambal defisit tersebut adalah konsekuensi dari stimulus yang digelontorkan pemerintah. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memperhatikan skala prioritas pembelanjanya berdasarkan tingkat urgensinya. Selain itu, pengawalan DPR RI terhadap peran lembaga pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara, serta penegak hukum juga semakin penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Pendahuluan

Penyebaran Covid-19 semakin masif dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan dalam beberapa waktu terakhir ini. Secara global, Badan Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan jumlah kasus positif Covid-19 telah mencapai 5.934.936 orang dan meninggal 367.166 orang pada 31 Mei 2020. Kasus ini mengalami kenaikan sebesar 33,81% atau menjadi 7.941.791 pada 16 Juni

2020. Di Indonesia, data resmi pemerintah menunjukkan sebaran kasus positif sampai dengan 16 Juni 2020 mencapai 40.400 kasus dan dengan angka kematian sebesar 2.198 jiwa dan angka sembuh 15.703 jiwa. Dihitung dari jumlah kasus sejak 31 Mei 2020, kenaikan kasus positif mencapai 52,61% (26.473 kasus menjadi 40.400 kasus) pada 16 Juni 2020. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).



Sebaran ini terjadi di 34 provinsi secara nasional (covid19.go.id, 16 Juni 2020). Perkembangan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat, berdampak pada banyak aspek, antara lain aspek sosial dan ekonomi.

Dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19, pemerintah memberlakukan kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home*. Hal ini mengakibatkan beberapa sektor, antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara waktu. Implikasinya, dampak besar pada perekonomian negara baik itu dalam skala makro maupun mikro tidak terhindarkan (feb.unpad.ac.id, 10 Juni 2020). Sejumlah kebijakan dan langkah adaptasi telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Secara makro, pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap kondisi keuangan negara. Salah satu analisis misalnya, menyebutkan bahwa dampak tersebut adalah potensi defisit APBN 2020 yang diprediksikan dapat mencapai Rp1.028,50 triliun atau 6,72% dari produk domestik bruto (PDB) (cnbcindonesia.com, 3 Juni 2020). Dalam situasi seperti ini, kondisi keuangan negara akan terus tertekan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dan pembiayaan beberapa kebijakan sektor lain. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini mengkaji dampak penanggulangan

Covid-19 terhadap tekanan pada anggaran negara.

Kondisi Anggaran Negara pada Masa Covid-19

Selain kesehatan masyarakat, aspek yang sangat terpengaruh oleh pandemi Covid-19 adalah keuangan negara dalam APBN 2020. Akibatnya, sumber keuangan negara untuk membiayai berbagai stimulus untuk menangani Covid-19 terus tertekan di tengah-tengah pemasukan negara yang sedang menurun. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan defisit APBN 2020 berpotensi melebar mencapai Rp1.028,5 triliun atau 6,27% terhadap PDB. Tekanan terhadap APBN 2020 terus meningkat, karena pemerintah sebelumnya telah melebarkan defisit APBN 2020 dari 1,76% menjadi 5,07% terhadap PDB atau mencapai Rp852,94 triliun (Lampiran Perpres No. 54 Tahun 2020).

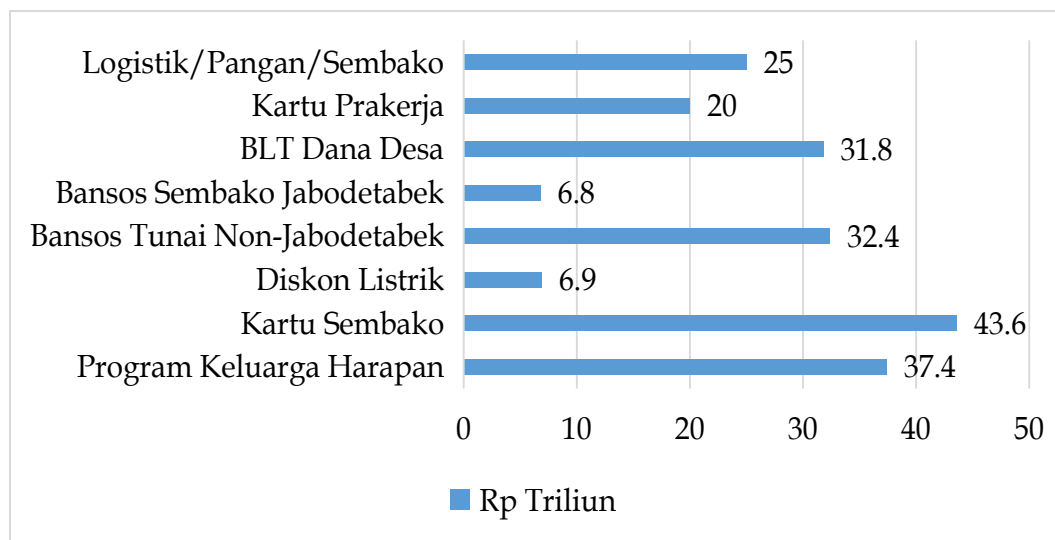
Sri Mulyani menjelaskan, pelebaran defisit APBN 2020 dikarenakan kebutuhan dana penanggulangan Covid-19 yang terus membengkak. Secara lebih rinci, pendapatan negara di tahun ini diperkirakan menurun dari perkiraan pemerintah dari Rp2.233,20 triliun menjadi Rp1.760,88 triliun. Penerimaan perpajakan menjadi hanya Rp1.462,63 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp297,75 triliun. Sementara belanja negara akan meningkat menjadi Rp2.613,82 triliun, dari sebelumnya hanya Rp2.540,42 triliun. Belanja pemerintah menjadi Rp1.851,10 triliun, namun Transfer ke Daerah

dan Dana Desa turun menjadi Rp762,72 triliun, dari sebelumnya Rp 856,94 triliun (Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020). Realisasi pendapatan negara hingga akhir Mei sebesar Rp664,3 triliun atau 37,7 persen dari target APBN yang telah mengalami perubahan melalui Perpres No. 54 tahun 2020 menjadi sebesar Rp1.760,9 triliun (money.kompas.com, 16 Juni 2020).

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 untuk menambah alokasi belanja dalam APBN 2020. Dana sebesar Rp695,20 triliun dana dianggarkan untuk pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran program PEN yang tertuang dalam Perpres No. 54 Tahun 2020 terdiri dari beberapa komponen yaitu pembiayaan korporasi dan

bantuan kepada Pemerintah Daerah, bantuan K/L dan Pemda, anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial, insentif usaha dan bantuan UMKM. Dari keseluruhan anggaran program PEN, Rp203,90 triliun dianggarkan untuk perlindungan sosial yang dapat dilihat rinciannya pada Gambar 1.

Dari alokasi Rp203,90 triliun anggaran untuk program perlindungan sosial, Program Keluarga Harapan memiliki anggaran sebesar Rp37,40 triliun, Kartu Sembako dianggarkan Rp43,60 triliun, Subsidi Listrik dianggarkan Rp6,90 triliun, Bansos Tunai Non-Jabodetabek dianggarkan Rp32,40 triliun, Bansos Sembako Jabodetabek dianggarkan Rp6,80 triliun, BLT Dana Desa dianggarkan Rp31,80 triliun, Kartu Prakerja dianggarkan Rp20 triliun dan Logistik/Pangan/Sembako dianggarkan Rp25 triliun.



Sumber: Kementerian Keuangan (2020)

Gambar 1. Alokasi Perlindungan Sosial Penanganan Dampak Covid-19

Defisit APBN 2020 juga disebabkan oleh penurunan pendapatan karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat sejak Maret 2020. Sementara itu pada saat yang sama belanja pemerintah terjadi secara besar-besaran, khususnya untuk bidang kesehatan dan sosial. Pada saat yang sama pemerintah perlu mendorong ekonomi dalam negeri.

Tekanan terhadap APBN 2020

Terbatasnya kondisi keuangan negara memaksa pemerintah untuk memperlebar defisit APBN 2020 untuk membiayai penanggulangan pandemi Covid-19. Keuangan pemerintah semakin tertekan ketika pandemi belum menunjukkan arah penurunan secara berarti dengan konsekuensi revisi Program PEN. Data menunjukkan pemerintah telah merevisi tiga kali anggaran Program PEN. Saat ini pemerintah akan menggunakan lima opsi dalam strategi pembiayaan APBN 2020 yaitu: (1) optimalisasi sumber internal pemerintah atau non-utang, (2) penarikan pinjaman, (3) penerbitan surat berharga negara (SBN) di pasar domestik, (4) penerbitan SBN valuta asing (valas), serta (4) dukungan dari Bank Indonesia (BI) (nasional.kontan.co.id, 16 Juni 2020).

Dengan beban pembiayaan APBN 2020 yang semakin besar, opsi yang dapat diandalkan adalah pembayaran yang bersumber dari utang. Terdiri dari penerbitan surat berharga negara Rp1.485,60 triliun dan

penarikan pinjaman Rp148 triliun. Hingga Mei 2020, penerbitan SBN telah mencapai Rp420,80 triliun, sedangkan pembelian SBN oleh perbankan di pasar perdana sebesar Rp110,2 triliun seiring kebijakan penurunan giro wajib minimum (GWM). Di sisi lain, surat perbendaharaan negara yang jatuh tempo mencapai Rp35,60 triliun. Adapun kebutuhan penerbitan SBN pada Juni hingga Desember 2020 diperkirakan mencapai Rp990 triliun. (katadata.co.id, 1 Juni 2020).

Pada tahun 2019, posisi utang luar negeri pemerintah telah mencapai USD199,90 miliar bersumber pinjaman sebesar USD54,40 miliar dan surat utang sebesar USD145,50 miliar. Sebagian besar utang ini memang berasal dari surat utang. Jumlah utang ini hampir 36% dari nilai PDB tahun yang sama meskipun strukturnya lebih didominasi oleh utang jangka panjang (89,3%) (Bank Indonesia, 2020; Basri, 2020).

Selain itu, besarnya cicilan utang pokok dan bunga utang tentu memberikan tekanan pembiayaan anggaran. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2019, pembayaran utang luar negeri pemerintah mencapai USD14,60 miliar terdiri atas utang pokok sebesar USD10,10 miliar dan bunga USD4,40 juta (Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, 2020).

Defisit anggaran yang membengkak dan tambahan utang adalah konsekuensi dari stimulus melalui kebijakan fiskal.

Dalam situasi seperti sekarang, pembiayaan dalam negeri pasti dirasa sulit. Sedangkan utang luar negeri bersifat sensitif dari sisi politik, apalagi dengan kondisi global yang juga tidak menentu. Oleh karena itu, pembiayaan dari Bank Indonesia merupakan pilihan terakhir untuk dapat menyerap utang pemerintah guna membantu menangani dampak pandemi Covid-19.

Penutup

Dampak pandemi Covid-19 pada perekonomian dan APBN 2020 masih akan terus menekan kapasitas fiskal pemerintah. Upaya mitigasi yang memadai perlu didukung dengan pengambilan keputusan secara tepat. Dengan demikian, dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan negara dapat dikelola. Pemerintah telah mengeluarkan Program PEN untuk menanggulangi dampak Covid-19 baik dalam aspek medis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah dituntut mampu memprioritaskan alokasi dana stimulus. Hal tersebut diperlukan untuk mengukur kemungkinan yang terjadi terhadap perekonomian. DPR RI melalui fungsi anggarannya perlu memerhatikan skala prioritas belanja berdasarkan tingkat urgensinya dan menuntut pengalokasian anggaran yang tepat dan efektif. DPR RI juga harus mengawal peran lembaga pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara, dan penegak hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pembiayaan dampak Covid-19.

Referensi

- Bank Indonesia. "Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh Melambat", 16 Maret 2020, <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/inforterbaru/Pages/Utang-Luar-Negeri-Indonesia-Januari-2020-Tumbuh-Melambat.aspx>), diakses 11 Mei 2020.
- Basri, F. (2020). *Dunia dan Indonesia Usai Coronavirus Covid-19*. Makalah Disampaikan pada ISPE Lecture 2020, INDEF, Jakarta.
- "Bu Sri Mulyani, Pak Jokowi Titip Pesan Penting Nih", 3 Juni 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200603102328-4-162648/bu-sri-mulyani-pak-jokowi-titip-pesan-penting-nih>, diakses 14 Juni 2020.
- "Defisit APBN Mei 2020 Capai Rp 179,6 Triliun", 16 Juni 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/06/16/114100826/defisit-apbn-mei-2020-capai-rp-179-6-triliun?>, diakses 16 Juni 2020.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. "Peta Sebaran", 16 Juni 2020, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses 16 Juni 2020.
- "Implementasi Kebijakan Keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah Akibat Pandemi Covid-19", <http://www.feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-covid-19/>, diakses 14 Juni 2020.

Kementerian Keuangan. "Program PEN", https://kemenkeu.go.id/media/15366/photostory_pen_demandside.pdf, diakses 15 Juni 2020.

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. *Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (2020)*. Jakarta: Kemenkeu dan BI.

"Meski defisit melebar, strategi pembiayaan APBN dipastikan tidak berubah", 16 Juni 2020,

<https://nasional.kontan.co.id/news/meski-defisit-melebar-strategi-pembiayaan-apbn-dipastikan-tidak-berubah?>, diakses 16 Juni 2020.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.



Rais Agil Bahtiar
rais.bahtiar@dpr.go.id



Hariyadi
hariyadi@dpr.go.id

Rais Agil Bahtiar, S.S., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dan langsung melanjutkan pendidikan S2 Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2018 dengan tesis berjudul "Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Studi di Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Barat)". Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Dr. Hariyadi, S.IP., M.PP., menyelesaikan pendidikan S-1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1995), S2 Business, Economic and Policy Studies, Univ. of Brunei Darussalam, Brunei Darussalam (2002), dan S3 dalam bidang Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (2019). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "The Prospect For REDD+ in A Post First Commitment Period of the Kyoto Protocol" (2012); "Pelaksanaan Kebijakan Moratorium Pembukaan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut: Studi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah" (2014); dan "Implementasi Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan Menyongsong RPJMN 2015-2019 (Studi di Provinsi Papua dan Provinsi Aceh)" (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.